PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Raisya Yunisa
21110192

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data sekunder atas variabel tersebeut diambil dari kabupaten dan kota yang ada di Indonesia periode 2011-2012.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan metode analisa regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan PAD secara parsial berpengaruh secara positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal secara positif namun tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Selanjutnya dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan belanja modal secara simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1999 dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian tahun 2004 direvisi menjadi UU No. 31 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang ini secara langsung mengubah pola pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi pada hakikatnya memberi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Fransiscus dan Santo, 2013). Desentralisasi fiskal diharapkan dapat berdampak positif bagi perkembangan pemerintah daerah. Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor salah satunya adalah sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik akan dapat menambah daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah (Menurut Harianto dan Adi, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tujuan daripada PAD yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing (Ni Putu, 2014). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki agar dapat meningkatkan PAD sehingga dapat membiayai pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana daerah. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011).

Setiap daerah dituntut untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah tapi, tidak semua daerah dapat membiayainya menggunakan PAD, karena kemampuan masing-masing daerah untuk menyediakan pendanaan bergantung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi yang menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan daerah (Darwanto dan Yulia, 2006).

Belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Alexiou, 2009). Pertumbuhan Ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012).

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memepengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Penelitian ini juga dimotivasi karena adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, dimana menurut Winda (2013) PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan menurut Santosa (2013) PAD tidak berpengatuh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Guntur (2014) DAK berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akan tetapi dengan arah yang

berlawanan, sedangkan menurut Winda (2013) DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengulangi penelitian terdahulu dengan berpedoman pada sumber yang telah ada dan akan mencoba menganalisis pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Penelitian ini berpedoman pada penelitian Budi Santosa (2013), Ni Putu dan Ni Luh (2014), dan Winda (2013) penulis mencoba untuk melakukan penelitian sejenis dengan objek penelitian yang berbeda serta modifikasi pada variabel independen dan dengan lokasi penelitian yang berbeda serta penggunaan data sekunder yang lebih besar.

Objek penelitian yang dipilih adalah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan periode anggaran 2011-2012. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
2. Masih tidak meratanya kekuatan infrastruktur penunjang perekonomian daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya berkembang di perkotaan saja.
3. Pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah dana perimbangan, PAD dan belanja modal bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia periode 2011-2012.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi;
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan, PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi..

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai tambahan masukan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam menganalisis penerimaan dana perimbangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dan pengalokasian belanja modal, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota.

1.4.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta dapat menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah dilapangan.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk peneliti lain dalam menambah ilmu dan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal bertujuan agar tidak terjadinya kesenjangan antar pemerintah daerah di berbagai sektor. Dalam penyelenggaraaan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal (Phentury, 2011).

Agar terciptanya pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik diperlukankannya efisiensi dalam pelakasanaannya, menurut Vazquez dan McNab (2001) ada dua alasan mengenai efisiensi desentralisasi fiskal;

1. Apabila pemerintah lokal cerdas dan mampu membaca keinginan konstituennya maka akan mudah dalam mengadaptasikan kebijakan pengeluarannya, sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan individu *(consumer efficiency).*
2. Pembelanjaan dan di tingkat lokal akan mendorong "*producer efficiency"* akibat pelayanan yang lebih murah dalam penyediaan infrastruktur.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17) yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan

2.1.3 Dana Perimbangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan atau ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
4. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

2.1.3.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *"Block Grant"* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum terdiri dari: Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/korta (DPJK).

2.1.3.2 Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Budi Santosa, 2013)

2.1.3.3 Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas; PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PPh WPOPDN (Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh Pasal 21.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Indra Bastian, 2002).

Peningkatan PAD menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2007).

Sumber pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2.1.4.1 Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2, pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Adapun jenis-jenis pajak daerah yaitu;

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
2. Pajak Kabupaten/Kota

Adapun besarnya tarif, untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksuimum yang telah ditentukan dalam UU (www.djpk.depkeu.go.id).

2.1.4.2 Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu;

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut PP No. 66 Tahun 2001 Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat danikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Sedangkan Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (PP No. 66 Tahnun 2001).

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut PP No. 66 Tahun 2004 Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

2.1.4.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hessel Nogi (2012,149) menyatakan Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain hibah atau penerimaah dari daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Nordiawan (2006), belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tertentu. Alokasi belanja modal ini akan meningkatkan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat ini lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dakam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi dari masyarakat. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal pada hakikatnya memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat diaktegorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.6.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut;

1. Jumlah penduduk;
2. Persediaan barang-barang modal;
3. Luas tanah dan kekayaan alam;
4. Penerapan Teknologi.

2.1.6.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Schumpeter

Peranan pengusahan atau wirausahawan sangat penting dalam memengaruhi pertumbuha ekonomi. Itulah salah satu hal yang ditekankan Schumpeter dalam teorinya. Pengusaha akan terus menerus malakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh.

Menurut Schumpeter, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Sulitnya melakukan inovasi membuay pertumbuhan ekonomi berjalan lambat hingga ankhirnya berhenti pada titik tertentu. Keadaan ini disebut *stationary state.*

2.1.6.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari aliran neoklasik adalah sebagai berikut;

1. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar

Investasi yang terjadi pada tahun tertentu akan menyebabkan peningkatan barang modal pada tahun berikutnya. Agar seluruh penambahan barang modal tersebut digunakan seluruhnya maka total pengeluaran harus meningkat sebesar penambahan barang modal tersebut. Kenaikan total pengeluaran menyebabkan kenaikan pendapatan nasional (PDB). Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya peningkatan PDB dari suatu negara atau masyarakat. Oleh karena itu, investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga ikut mengalami kenaikan.

2. Teori pertumbuhan ekonomi Solow

Berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Abramovitz dan Soloe, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Bisa juga dikatakan bahwa teori ini lebih melihat dari sisi penawaran atau sisi produksi.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000).

2.1.6.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap berikut;

1. Perekonomian Tradisional *(The traditional Society).*
2. Perekonomian Transisi (The Precondition for Take Off).
3. Perekonomian Lepas Landas (*The Take Off).*
4. Perekonomian Menuju Kedewasaan (*The drive to maturity)*.
5. Perekonomian dengan Tingkat Konsumsi yang Tinggi (*The Age of High Mass Consumption).*

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan Yulian Rinawaty dkk (2009) menganalisis pengaruh dana perimbangan terhdap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Tengah, menemukan bahwa dana perimbangan secara keseluruhan dimana melibatkan komponen-komponenya yaitu DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Santosa (2013) mengatakan bahwa DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkatkan pelayanan publik. Demikian juga dengan DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga pengaruh DAK, dan DBH terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah memang semestinya signifikan.

2.2.2 Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Setyawati (2007) dalam penelitiannya mengatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan semakin tinggi PAD, maka semakin meningkat laju pertumbuhan ekonominya. Karena pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah.

2.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Guntur (2013) dalam penelitiannya mengatakan belanja modal berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai modal maka akan menyebabkan peningkatan pula pada capaiaan pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi sebagai modal dasar berkembangnya aktivitas ekonomi serta yang menjadi daya tarik bagi investor merupakan hasil pengadaan aset yang direalisasikan melalui anggaran belanja modal. Oleh karena itu strategi alokasi anggaran belanja modal yang tepat sasaran untuk infrastruktur ekonomi yang mampu menjadi trigger/katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Hipotesis 2 : PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Hipotesis 3 : Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Hipotesis 4 : Dana Perimbangan, PAD, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

III. Objek Dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Suharsmi Arikunto (2006:29) mengatakan bahwa objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penetian.

Maka objek penelitian merupakan sasaran dalam penelitian ilmiah untuk mendapatkan suatu hasil berupa data sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pengertian objek penelitian diatas maka objek dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal dalam APBD kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011 dan 2012.

3.2 Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2011:2) menyatakan bahwa Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif dan verifikatif.

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Indrianto Nur dan Supomo Bambang (2002: 249), desain penelitian adalah rancangan utama oenelitian yang menyatakan metode-metode dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Narimawati Umi (2008:30) operasionalisasi variabel adalah adalah proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variable, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variable sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka diperlukan analisis faktor."

Agar lebih jelas mengenai variabel-variabel yang diteliti, maka dapat dituangkan dalam tabel operasional variabel pada tabel 3.1.

3.2.3 Sumber dan Teknik Penentuan Data

3.2.4.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah menggunakan perhitungan matematika.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten/kota yang ada di Indonesia periode tahun anggaran 2011-2012 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan.

3.2.4.2 Teknik Penentuan Data

Untuk menudukung hasil penelitian, maka peneliti akan mengelompokkan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia. Data yang digunakan adalah selama dua tahun, dimulai dari tahun 2011 sampai 2012. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui populasi data awal adalah sebanyak 980 data, Namun data yang didapat penulis bahwa hanya ada 434 laporan keuangan yang sudah dipublikasikan pada website resmi DPJK. Adapun rincian datanya adalah 234 LRA pada tahun 2011, 200 LRA pada tahun 2012, sehingga jumlah data yang akan diolah pada penelitian ini adalah 434 LRA dari 490 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dengan periode anggaran 2011 sampai dengan 2012.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut..

Data Pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia per tahun 2011 adalah sebanyak 490 kabupaten/kota. Rincian data Laporan Realisasi Anggaran periode anggaran 2011-2012 adalah sebanyak 434 data kabupaten/kota di Indonesia.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Dokumentasi

Menurut Narimawati Umi (2010:40) pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2014.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini dilakukan dengan dengan mengumpulkan data dan teori dari membaca literatur-literatur, bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Serta penggunaan media internet sebsgai media pendukung dalam penelusuran informasi mengenai teori maupun data yang diperlukan.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan persamaan linear regresi berganda untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3.2.6 Uji Asumsi Klasik

Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.2.7.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2011:110), tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

3.2.7.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji Multikolinieritas adalah untuk menguji apakah dalam metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 *auxiliary regressions* maka dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

3.2.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2006) untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik*scatterplot.*

3.2.7.4 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2005), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

3.2.7 Uji Hipotesis

3.2.8.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi (R^2) berguna mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Menurtu Ghozali (2006), semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen.

3.2.8.2 Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2006), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel independen. Caranya dengan membandingkan nilai kritis F ($F\text{-}_{tabel}$) dengan nilai $F\text{-}_{hitung}$ (F RATIO) pada tabel *Analysis Variance* dari hasil perhitungan. Dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ukuran 5% atau 1%. Jika Probabilitas yang ditunjukkan >5%, maka model ditolak, sedangkan jika <5%, maka model diterima.

3.2.8.3 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Memiliki kesimpulan, jika t-hitung>t-tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, dan jika t-hitung<t-tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan utnuk mengetahui karakter data sampel secara menyeluruh, data yang telah diolah dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi dari tiap variabel.

4.1.2 Hasil Analisis Verivikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. **Hasil Uji Normalitas**

   Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terdistribusi normal atau tidak. Hal ini dapat dideteksi melalui analisis statistik. Salah satu uji normalitas yaitu dengan grafik P-P Plot. Data yang baik adalah data yang berditribusi normal, dan titik-titik data pada grafik P-P Plot tidak melenceng ke kiri ataupun kekanan, melainkan menyebar di sekitas garis diagonal.

   Pada grafik P-P Plot dapat ditarik kesimpulan bawa pada penelitian ini data berdistribusi normal.

2. **Hasil Uji Multikolinieritas**

   Uji Multikolinieritas bertujuan menguji korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. kedasarkan tabel 4.2 nilai *tolerance* pada variabel DP, PAD dan BM menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10 yaitu Belanja Modal sebesar 0,968, Dana Perimbangan sebesar 0,307 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,312. Kemudian untuk seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu DP, PAD dan BM memiliki angka *variance inflaction factor* (VIF) lebih kecil dari 10,00, BM memiliki angka 1,033, DP sebesar 3,258 dan PAD sebesar 3,208. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala multikolonieritas pada variabel independen di penelitian ini.

3. **Hasil Uji Auto Korelasi**

   Tujuan dari uji ini adalah menguji ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi.

   Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai *Durbin Watson* (D-W) sebesar 2,119, sementara dari tabel d pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel bebas = 3 dan jumlah data = 433 diperoleh batas bawah nilai tabel (dL) = 1,83236 dan batas atasnya (dU) = 1,85105. Karena nilai *Durbin Watson* model regresi (2,119) berada diantara dU dan 4-dU, yaitu daerah tidak ada autokorelasi sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi.

4. **Hasil Uji Heterokodesitas dengan Glejser**

Tujuan dari Uji Heretoskedastisita adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Dana Perimbangan (X1) sebesar 0,336 lebih besar dari 0,05, pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) memiliki nilai signifikansi 0,077 lebih besar dari 0.05, dan pada variabel Belanja Modal (BM) nilai signifikansi menunjukkan angka 0,203 lebih besar dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa pada ketiga variabel independen tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa semua pengujian data tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis regresi diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut: *PDRB = 0,007+ 0,058DP + 0,142PAD + 0,28BM*

Keterangan:

1. Konstanta sebesar 0,007 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (PAD, DP, dan BM) maka tingkat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0007
2. Koefisiesn regresi dana perimbangan (β_1DP) = 0,0058 menunjukkan bahwa jika dana perimbangan mengalami perubahan nilai 1 dan variabel independen lainnya mengalami perubahan dengan nilai 0, maka Dana Perimbangan akan mengalami peningkatan sebesar **PDRB = 0,007+ 0,058(1) + 0,142(0) + 0,28(0)=0,065.**
3. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (β_2PAD) sebesar 0,058 artinya jika variabel PAD mengalami perubahan nilainya 1 dan DP dan BM mengalami perubahan nilainya 0 maka Laju Pertumbuhan akan mengalami peningkatan sebesar **PDRB = 0,007+ 0,058(0) + 0,142(1) + 0,28(0)=0,149.**
4. Koefisien regresi variabel Belanja Modal (β_3PAD) sebesar 0,28 artinya jika variabel BM mengalami perubahan nilainya 1 dan DP dan PAD mengalami perubahan nilainya 0 maka Laju Pertumbuhan akan mengalami peningkatan sebesar **PDRB = 0,007+ 0,058(0) + 0,142(0) + 0,28(1)=0,287.**

4.1.2.3 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi mengukur sejauh mana model dapat menerangkan variabel independen. Tabel 4.6 menunjukkan nilai koefisien (R) sebesar 0,048 yang berarti hubungan antara laju pertumbuhan dengna variabel independen Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal adalah lemah. Angka 0,048 berarti 4,8% faktor-faktor laju pertumbuhan dapat dijelaskan oleh variabel independen Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Sedangkan selebihnya 95,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.1.2.4 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji t (parsial).

Pada tabel 4.7 diperoleh nilai thitung variabel Dana Perimbangan sebesar 2,269 dengan nilai signifikansi 0,024. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji t (parsial) sebesar 1,966. Maka nilai thitung (2,269) > ttabel (1,966) pada tingkat kekeliruan 0,05 diputuskan untuk menolak Ho dan Ha1 diterima. Maka dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

4.1.2.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji parsial selanjutnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Pada tabel 4.7 diperoleh nilai thitung variabel PAD sebesar 4,042 dengan nilai signifikansi 0,00. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji t (parsial) sebesar 1,966. Maka nilai thitung (4,041) > ttabel (1,966) pada tingkat kekeliruan 0,05 diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha1. Maka dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhdap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

4.1.2.6 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji parsial selanjutnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Pada tabel 4.7 diperoleh nilai thitung variabel belanja modal sebesar 1,440 dengan nilai signifikansi 1,41. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji t (parsial) sebesar 1,966. Maka nilai thitung (1,440) < ttabel (1,966) pada tingkat kekeliruan 0,05 diputuskan untuk menerima Ho dan menolak Ha1. Maka dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

4.1.2.7 Pengaruh Dana Perimbangan, PAD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dengan menggunakan uji F. Hasil uji ANOVA atau F-test pada tabel 4.8 menunjukkan nilai F hitung sebesar 7,189 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan F tabel adalah 2,63 dengan tigkat signifikansi 0,05 sehingga Fhitung(7,189) > Ftabel (2,63) dengan tigkat signifikansi penelitian 0,00. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasar pada uji parsial pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi diketahui bahwa dan perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Pusporini (2006) yang mengatakan bahwa dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dan transfer dari pemerintah pusat.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi berdasar pada uji t dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat BAPENAS.

4.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian Anasmen (2009) yang mengatakan bahwa belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun memiliki koefisein positif. Berdasarkan hasil analisis regresi berarti menolak hipotesis pada bab 1.

4.2.4 Pengaruh Dana Perimbangan, PAD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan memiliki hasil yang menyatakan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

V. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota yang ada di Indonesia periode anggaran 2011 dan 2012, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana perimbangan sangat berpengaruh dan berdampak secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Maka semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh maka laju pertumbuhan ekonomi suatu daerahpun akan meningkat.
3. Belanja modal secara positif namun tidak begitu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini konsisten dengan penelitian Bati (2009). Hal ini diduga karena porsi belanja modal pemerintah yang tidak terlalu besar.
4. Dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

Terkait hasil penelitian dan kesimpulan di atas, dapatlah dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Saran Praktis / Operasional

Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja modal karena hal ini sangat dapat mendukung perekonomian masyarakat di daerah. Pada pendapatan asli daerah pemerintah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan yang potensial di daerahnya. Sehingga dapat terwujud otonomi daerah dan terwujudnya daerah yang mandiri.

2. Saran Akademis

Analisis penelitian ini hanya sebagian kecil dari komponen APBD yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel lain yang terkait yang tidak dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini hanya dilakukan pada dua tahun anggaran saja, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait pertumbuhan ekonomi. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan periode anggaran yang lebih lama sehingga dapat memberikan dampak yang lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Alexiou Constantinous. 2009. Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE). *Journal of Economic and Social Reasearch* 11(1) : 1-16

Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 2000-2006.* Tesis Program MPKP. Universitas Indonesia.

Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2009-2013*.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012.* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan, 2013.

___. *Deskripsi dan Analisis APBD 2013.* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan, 2014.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013.* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan, 2014.

___. *Deskripsi dan Analisis APBD 2012.* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan, 2013.

Fransiskus Randa dan Santo Paledung. 2013, *Memahami Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Fenomenologi pada Kabupaten Poso),* Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Vol 11 No 1 April 2013, hal 53-81 Fakultas Ekonomi UAJ Makassar

Halim, Abdul.2007. *Akuntansi Keuangan Daerah.*Jakarta: Salemba Empat

Imam, Ghozalli. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit-Undip

Indarto, Muhammad. *Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah dalam APBN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.* Tesis program MPKP. Universitas Indonesia. 2011.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* ANDI Yogyakarta. 2002.

Mulyana, Subkhan & Slamet. (2006). *Keuangan Daerah; Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia.* Jakarta: LPKAP Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPKP).

Nogi, Hessel. 2007. *Manajemen Publik.* Jakarta: Grasindo

Pujiati Amin. 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karaasidenan Semarang era Desentralisasi Fiskal*

Putro, Nugroho Suratno. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota DI Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Santosa, Budi. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia.* Jurnal Keuangan dan Bisnis. Vol. 5, No. 2, Juli 2013.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung:Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D.* Bandung: Cv.Alfabeta

Sukirno Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan,* Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Kencana.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori Dan Aplikasi.*Bandung: Agung Media

___. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

___. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

___. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

___. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

___. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran	Instrumen
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan asli daerah meliputi: a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rasio	Observasi
Dana Perimbangan (X2)	Dana Perimbangan meliputi: a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Bagi Hasil	Rasio	Observasi
Belanja Modal (X3)	Belanja Modal Meliputi: a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya	Rasio	Observasi
Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju pertumbuhan PDRB	Rasio	Observasi

(BAB III, halaman 56)

Tabel 3.2
Populasi Kabupaten/Kota di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota
1	2011	490
2	2012	490
Total		980

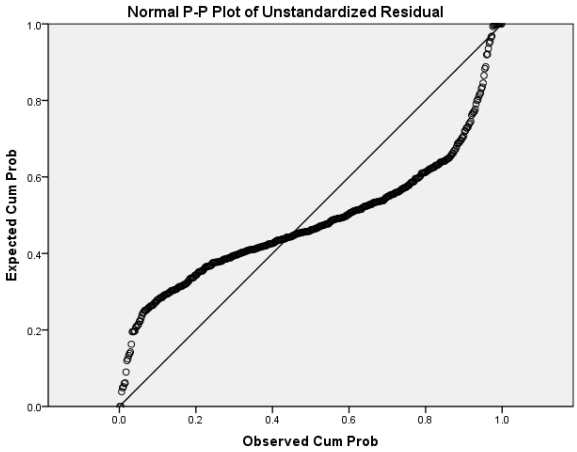
(BAB III, halaman 58)

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	434	.004	.760	.08052	.083118
Belanja Modal	434	.000	.516	.14109	.086109
Dana Perimbangan	434	.152	.974	.78072	.115695
Laju Pertumbuhan Ekonomi	434	-.270	.354	.06691	.034623
Valid N (listwise)	434				

(BAB IV, halaman 63)

Gambar 4.1
Uji Normalitas



(BAB IV, halaman 66)

Tabel 4.2
Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Belanja Modal	.968	1.033
	Dana Perimbangan	.307	3.258
	Pendapatan Asli Daerah	.312	3.208

a. Dependent Variable: Laju Pertumbuhan Ekonomi

(BAB IV, halaman 66)

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi

Durbin-Watson
2.119

a. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

b. Dependent Variable: PDRB

(BAB IV, halaman 68)

Tabel 4.4
Uji Heterokodesitas dengan Glejser

Model		Statistics	
		t	Sig.
1	(Constant)		
	DP	.970	.336
	PAD	1.797	.077
	BM	1.286	.203

a. Dependent Variable: abs_re

(BAB IV, halaman 69)

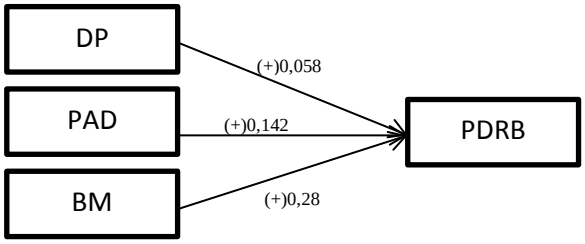
Tabel 4.5
Regresi Linear Berganda

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
B	Std. Error	Beta	t	Sig.
.007	.022		.295	.768
.028	.019	.069	1.440	.151
.058	.025	.193	2.269	.024
.142	.035	.341	4.042	.000

a. Dependent Variable: Laju Pertumbuhan Ekonomi

(BAB IV, halaman 70)

Gambar 4.1
Model analisis regresi berganda



(BAB IV, halaman 71)

Tabel 4.6
Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.219[a]	.048	.041	.03390355305

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan

b. Dependent Variable: Laju Pertumbuhan Ekonomi

(BAB IV, halaman 72)

Tabel 4.7
Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.007	.022		.295	.768
	Dana Perimbangan	.058	.025	.193	2.269	.024
	Pendapatan Asli Daerah	.142	.035	.341	4.042	.000
	Belanja Modal	.028	.019	.069	1.440	.151

a. Dependent Variable: Laju Pertumbuhan Ekonomi

(BAB IV, halaman 72)

Tabel 4.8
Pengaruh Dana Perimbangan, PAD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.025	3	.008	7.189	.000[a]
	Residual	.494	430	.001		
	Total	.519	433			

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
b. Dependent Variable: Laju Pertumbuhan Ekonomi

(BAB IV, halaman 75)